

yang cenderung menampilkan data- data yang lengkap dengan analisisnya yang tajam sebagai bahan dari wacana diskusi. Hal tersebut sebagaimana dituturkan Ignatius Haryanto dengan pendapatnya “ Harian Kompas bukan semata surat kabar yang terbit tiap hari, tapi juga menggelindingkan sejumlah isu dan menawarkan diri sebagai wahana diskusi berbagai komponen Masyarakat. Banyak study dalam dan luar negeri, pernah ditulis oleh harian Kompas lewat berbagai aspek. Ada yang menulis dimensi *humanisme transedental* yang jadi salah satu ideology harian Kompas.. Bahkan secara ekstrim wartawan senior Rosihan Anwar mempunyai pendapat sendiri tentang Harian Kompas yang menyebut jenis jurnalisme Haria Kompas sebagai “jurnalismekepiting”. Maksudnya, kepribadian Harian Kompas bergerak ala kepiting, mencoba melangkah setapak demi setapak untuk mengetes seberapa jauh kekuasaan memberikan toleransi kebebasan pers yang ada. Jika aman, kaki kepiting bias maju beberapa langkah, jika kondisi tidak memungkinkan , kaki kepiting pun mundur beberapa langkah.

Seiring dengan pesatnya pertumbuhan dan perkembangan bisnis perusahaan, secara struktur organisasi kelompok Kompas Gramedia terbagi atas beberapa kelompok usaha (SBU) berdasarkan jenis usaha atau jasa layanan yang dilakukan, seperti: Kelompok Percetakan, Kompas, Majalah, Gramedia Pustaka Utama(GPU). Penerbitan dan Multi Media(MMSP), Perdagangan dan Industri, Hotel Santika, Media Olahraga(Medior), Pers Daerah, Radio Sonora, PT. Kompas Cyber Media. Pada saat ini tercatat kurang lebih 12.000 orang karyawan tergabung dalam kelompok Kompas Gramedia, yang tersebar hamper di seluruh wilayah Indonesia.

Nomor perdana Kompas terbit pada tanggal 28 Juni 1965.Pada saat itu, sesuai dengan ketentuan pemerintah, Kompas harus berafiliasi pada salah satu partai politik.Kompas memilih berafiliasi pada Partai Katholik.Ini merupakan pilihan logis karena kebanyakan stafnya beragama Katolik dan pendukung-pendukungnya adalah pemimpin partai itu, misalnya I.J. Kasimo.

Tanggal 2 Oktober 1965, Papelrada Jakarta Raya mengeluarkan larangan terbit (pembreidelan) untuk semua harian, termasuk Kompas. Empat hari kemudian Kompas diperbolehkan terbit.

Tanggal 21 Januari 1978, Kompas dibreidel kembali bersama enam surat kabar lainnya karena dinilai meliput secara intensif gerakan mahasiswa 1977-1978. Kompas terbit kembali pada 6 Februari 1978.

Melihat tingkat sebaran Kompas yang mencapai seluruh penjuru Nusantara dan ingin hadir setiap pagi ditangan pembacanya, maka sejak 1 September 1997, Kompas memulai sitem cetak jarak jauh di Bawen Jawa Tengah.

Wajah Kompas hari ini adalah hasil dari perubahan tata wajah Kompas secara besar-besaran pada tanggal 28 Juni 2005. Logo Kompas tampil dengan warna biru, jumlah kolom dikurangi dari sembilan menjadi tujuh. Untuk memandu pembaca, di setiap halaman muka sebelah kiri ditampilkan navigasi.

Kompas sebagai suatu perusahaan media massa yang besar dan prestisius ini merupakan sebuah perusahaan yang paling lama atau mempunyai umur yang lebih lama dari media yang lainnya. Harian yang bermotto ” Amanat Hati Nurani Rakyat”. Diawali dengan akan bangkrutnya PT Kinta dengan terbitan majalah bulanan Intisari yang didirikan oleh (Alm.) Auwjong Peng Koen, atau lebih dikenal dengan nama Petrus Kanisius Ojong seorang pimpinan redaksi mingguan Star Weekly, berserta Jakob Oetama, wartawan mingguan Penabur milik gereja Katolik. Edisi perdana dari bulanan Inti Sari terbit pertama kali pada tanggal 7 Agustus 1963, dengan jumlah 128 halaman dengan terdiri dari 22 artikel.

Edisi perdana ini memuat karya terjemahan tentang bintang layar perak Marilyn Monroe, pengalaman perjalanan ke London Nugroho Notosusanto, seorang ahli sejarah dari Universitas Indonesia, dan kisah Usmar Ismail, sutradara film kenamaan, ketika pertama kali membuat film. Tahun 1964 Presiden Soekarno mendesak Partai Katolik untuk mendirikan koran, maka dari wartawan bulanan Intisari inilah sebagian wartawan Katolik direkrut. Selanjutnya, beberapa tokoh Katolik terkemuka seperti P.K. Ojong, Jakob Oetama, R.G. Doeriat, Frans Xaverius Seda, Policarpus Swantoro, R. Soekarsono, mengadakan pertemuan bersama beberapa wakil elemen hierarkis dari Majelis Agung Wali Gereja Indonesia (MAWI): Partai Katolik, Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI), Pemuda Katolik dan Wanita Katolik. Mereka sepakat mendirikan Yayasan Bentara Rakyat.

Susunan pengurus pertama dari Yayasan Bentara Rakyat adalah; ketua Ignatius Joseph Kasimo (ketua Partai Katolik), wakil ketua Frans Seda (Menteri Perkebunan dalam kabinet Soekarno), penulis I F.C. Palaunsuka, penulis II Jakob Oetama, dan bendahara P.K. Ojong. Dari Yayasan Bentara Rakyat inilah harian Kompas dilahirkan.

Pada awal penerbitannya, Frans Seda yang pada waktu itu menjabat sebagai menteri perkebunan rakyat mengatakan Jenderal Ahmad Yani menyarankan bahwa supaya Kompas memberikan wacana untuk menandingi wacana PKI yang berkembang, pada saat itu. Namun secara pribadi Jacob Oetama dan beberapa pemuka agama Katolik seperti Monsignor Albertus Soegijapranata, Ignatius Joseph Kasimo tidak mau menerima begitu saja mengingat kontekstual politik, ekonomi dan infrastruktur pada saat itu tidak mendukung.

Tapi tekad Partai Katolik menerbitkan koran sudah final Ojong dan Oetama ditugaskan membangun perusahaan. Mulailah mereka bekerja mempersiapkan penerbitan koran baru,

corong Partai Katolik. Tapi, suhu politik yang memanas saat itu, membuat pekerjaan ini tak mudah. Rencananya, koran ini diberi nama Bentara Rakyat. Menurut Frans Seda PKI tahu rencana itu, lantas dihadang, namun karena Bung Karno setuju jalan terus hingga izinnya keluar. Frans Seda mengacu pada Partai Komunis Indonesia adalah salah satu partai besar di Indonesia pada 1950-an dan 1960-an serta PKI memenangkan tempat keempat dalam pemilihan umum 1955.

Izin sudah di tangan, tapi Bentara Rakyat tak kunjung terbit. Rupanya rintangan belum semuanya berlalu. Masih ada satu halangan yang harus dilewati, yakni izin dari Panglima Militer Jakarta, waktu itu dijabat oleh Letnan Kolonel Dachja. Dari markas militer Jakarta, diperoleh jawaban izin operasi keluar jika syarat 5.000 tanda tangan pelanggan terpenuhi. Akhirnya para wartawan pergi ke pulau Flores untuk mendapatkan tanda tangan tersebut, karena memang Flores mayoritas adalah penduduk beragama Katolik.

Ketika akan menjelang terbit pertama kalinya Frans Seda yang pada waktu itu menjabat menteri perkebunan melaporkan pada Presiden Soekarno untuk melaporkan kesiapan terbitan perdana harian yang awalnya diberi nama 'Bentara Rakyat'. Namun dari Presiden Soekarno inilah lahir nama "Kompas" yang berarti adalah penunjuk arah. Akhirnya berdasarkan kesepakatan redaksi pada saat itu, untuk menerima usulan dari Presiden Soekarno untuk mengubah nama harian Bentara Rakyat menjadi Kompas.

Kompas edisi pertama dicetak oleh PN Eka Grafika, milik harian Abadi yang berafiliasi pada Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi).⁸ Tepat 28 Juni 1965, bayi Kompas lahir, dengan motto, "Amanat Hati Nurani Rakyat." Berita utama di halaman satu berjudul "KAA II Ditunda Empat Bulan." Sementara pojok kanan bawah mulai memperkenalkan diri, "Mari ikat hati. Mulai hari ini, dengan Mang Usil."

Di halaman pertama pojok kiri atas, tertulis nama staf: Pemimpin Redaksi Jakob Oetama; Staf Redaksi J. Adisubrata, Lie Hwat Nio, Marcel Beding, Th. Susilastuti, Tan Soei Sing, J. Lambangdjaja, Tan Tik Hong, Th. Ponis Purba, Tinon Prabawa, dan Eduard Liem. Menurut Jakob Oetama, nama P. K. Ojong ketika itu tabu politik dan lagi pula figur Ojong tidak disukai Soekarno.

Dalam kontekstual politik pada saat itu untung tak dapat diraih, malang tak bisa ditolak. Pagi hari 30 September 1965, tepat tiga bulan usia Kompas, sebagian besar warga Jakarta terlelap dalam tidur pulasnya, ketika sekelompok tentara bersenjata menangkap beberapa jenderal yang dituduh terlibat dalam Dewan Jenderal. Peristiwa ini mengubah jalannya republik. Sejarah mencatat sebagai upaya perebutan kekuasaan terhadap pemerintahan Soekarno. Seperti beberapa harian yang terbit bersama dengan Kompas, mereka tidak terlepas dari upaya untuk memberikan tandingan kepada pers yang berafiliasi dengan ideologi kiri seperti PKI, dan harian yang dituduh tidak revolusioner lainnya.

Sehari setelah peristiwa itu, August Parengkuan dan Ponis Purba yang tengah mendapat giliran tugas malam, diberi tahu pihak percetakan bahwa Kompas beserta surat-kabar lain tak boleh terbit. Hanya harian Angkatan Bersenjata, Berita Yudha, kantor berita Antara, dan Pemberitaan Angkatan Bersenjata yang diperbolehkan menyiarkan berita. Larangan untuk tidak naik cetak tersebut dikeluarkan oleh pihak militer Jakarta. Dalam surat perintah itu disebutkan “dalam rangka mengamankan pemberitaan yang simpang-siur mengenai pengkhianatan oleh apa yang dinamakan Komando Gerakan 30 September atau Dewan Revolusi, perlu adanya tindakantindakan penguasaan terhadap media-media pemberitaan.”

Ketika itu Parengkuan dan Purba tetap yakin Kompas tak perlu dilarang terbit. Alasannya, Kompas sudah mengecam pemberontakan, dan di dalam lay out sudah disiapkan bahwa Kompas

edisi 2 Oktober juga memuat pernyataan sikap dari Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana RE Martadinata.

Penyerangan terhadap PKI, ternyata tak menyelamatkan Kompas. Koran itu baru boleh terbit lagi pada 6 Oktober 1965. Rentang waktu seminggu itu, hingga saat ini menjadi misteri yang belum terkuak. Banyak asumsi, pertanyaan, dan analisis bergentayangan. Mengapa seluruh koran dibredel dan hanya menyisakan koran milik militer? Pertumbuhan Kompas meningkat. Saat pertama kali dicetak, oplah Kompas sekitar 4.800 eksemplar. Ketika pindah ke percetakan yang lebih bagus, Percetakan Masa Merdeka, tirasnya meningkat jadi 8.003 eksemplar, hingga menjelang pembredelan yang dilakukan Orde Baru.

Saat terbit kembali pada 6 Oktober 1965, tiras Kompas menembus angka 23.268 eksemplar. Zaman berganti. Soekarno diganti Jenderal Soeharto. Pada 1999, setahun sesudah Soeharto dipaksa mundur, tiras Kompas mencapai angka lebih dari 600 ribu eksemplar per hari. Penelitian yang dilakukan oleh lembaga riset AC Nielsen tahun 1999 menunjukkan pasar terbesar masih seputar Jakarta 46,77%, Bogor, Tangerang, dan Bekasi 13,02%, Jawa Barat 13,02%, Jawa Tengah, Yogyakarta 6,67%, Jawa Timur 2,04%, Sumatera 8,81%, Kalimantan 2,16%, dan Indonesia Timur 4,23%. Gramedia sebagai perusahaan induk Kompas tercatat sebagai perusahaan yang membayar pajak terbesar nomor 32 pada tahun 1980 sedang pada tahun pada tahun 1993 untuk perusahaan PT Kompas Media Nusantara saja diperkirakan menghasilkan Rp 240 milyar setahun dengan keuntungan bersih Rp 30 sampai 35 triliun. Tahun 1991 PT Gramedia dengan penerbitan bukunya menduduki urutan ke-151.

Konon katanya berkat surplus yang diraih Kompas-Gramedia kala itu, walau para pelanggan koran Kompas tak membayar biaya langganannya, surat kabar ini tetap bisa meraup keuntungan karena pemasukan dari iklan terus mengalir.

Sampai tahun 1991, angka penjualan Kompas mencapai 525.000 tiras perhari dan ditambah 50.000 eksemplar pada hari Minggu. Sebelumnya, tahun 1990, Kompas berekspansi dengan membentuk 38 anak perusahaan yang dikenal dengan kelompok Kompas-Gramedia yang bergerak di bidang percetakan, penerbitan, dan stasiun radio.

Dalam kancah dunia politik, sesuai ketentuan perundang-undangan pada waktu itu yang mengharuskan surat kabar berafiliasi ke partai politik, maka Kompas pun terpaksa berafiliasi ke partai. Tapi, itu tidak berlangsung lama, sebab sesuai dengan komitmen awal para perintisnya yang berpendapat, visi kemasyarakatan koran haruslah terbuka. Visi dan sikap itu selain sesuai dengan keyakinan pimpinan, juga cocok dengan fungsi pers yang dikehendaki umumnya masyarakat Indonesia, yaitu ikut mengembangkan, saling pengertian dalam masyarakat yang majemuk. Hal ini sesuai pula dengan paham falsafah bangsa Indonesia, Pancasila.

Saat ini Kompas terbit berdasarkan SIUPP SK Menpen No. 031/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1985 tertanggal 19 November 1985. SK ini disertai dengan Kep. Lapkus Pangkopkamtibda No. 103/PC/1969 tanggal 21 Januari 1969 yang diperolehnya setelah politik dalam negeri menampakkan kestabilan setelah peristiwa berdarah G.30.S/PKI meletus.

3. Visi dan Misi Kompas

Harian Kompas memiliki Visi dan Misi yaitu Menjadi agen perubahan dalam membangun komunitas Indonesia yang lebih harmonis, toleran, aman, dan sejahtera dengan mempertahankan Kompas sebagai market leader secara nasional melalui optimalisasi sumber daya dan sinergi bersama mitra strategis. Kompas sebagai harian nasional di Indonesia memiliki slogan “Amanat Hati Nurani Rakyat”. Slogan tersebut juga dijadikan sebagai visi dan misi dari

Harian Kompas. Secara umum, Kompas menyatakan diri sebagai harian yang independen dan mencoba lebih obyektif dalam setiap pemberitaannya.

Selain itu, Kompas menempatkan kemanusiaan sebagai suatu ideologi yang ditanamkan oleh (alm) Petrus Kanisius Ojong dan Jakob Oetama adalah Amanat Hati Nurani Rakyat yaitu memanusiaikan manusia dengan basis Ilahi (*Humanisme Transendental*).

Artinya, Kompas ingin dalam setiap pemberitaannya benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Sebagai harian yang mengidentifikasi pembawa kepentingan dan suara hati rakyat, Kompas mampu menghadirkan berita yang aktual dan kontroversi melalui kolom karikturnya. Ideologi Kompas selalu digunakan dalam produk jurnalistik Kompas. Petrus Kanisius Ojong (alm.) dan Jakob Oetama selalu mengajarkan jurnalisme yang santun kepada para karyawan Kompas dengan jalan mengedepankan cara yang santun dan elegan dalam memberikan kritik terhadap suatu keadaan. Pemilihan bahasa yang digunakan dipilih bahasa yang sopan dan santun tetapi orang yang diberikan kritik menyadari bahwa ada perbuatannya yang tidak benar.

Kompas dalam menyajikan berita cenderung sesuai dengan fakta realitas yang ada, lebih kritis dan tidak berpihak terhadap organisasi atau partai apapun untuk menghindari berita-berita yang membuat Kompas pernah diberhentikan dan dibredel oleh pemerintah. Inimengindikasikan bahwa editorial Kompas menjadi alat berlandung dari kekuatannya, salah satunya dalam bentuk karikatur. Kompas menjadi satu media yang mempunyai kekuatan dan kekuasaan besar untuk membantu meningkatkan dukungan dan mengajak khalayak untuk selalu berpihak pada setiap langkah kebijakan pemerintah.

4. Struktur Organisasi Kompas.

GM Litbang: F. Harianto Santoso, **GM SDM Umum:** Bambang Sukartiono, **Manager Diklat:** Tony D. Widiastono.

Kantor Redaksi: Jl. Palmerah Selatan 26-28, Jakarta 10270. **Telepon:** 534 7710/20/30, 530 2200 **Fax:** 5486085 **Alamat Surat (Seluruh Bagian):** P.O.Box 4621 Jakarta 12046 **Alamat Kawat:** Kompas Jakarta **Penerbit:** PT. Kompas Media Nusantara. **Surat Izin Usaha Penerbitan Pers:** SK Menpen No. 013/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1985 tanggal 19 November 1985, **Percetakan:** PT. Gramedia ISSN 0215-207x.

Perusahaan. Direktur Bisnis: Abun Sanda. **GM Iklan:** Fitricia Juanita. **Tarif Iklan:** Reguler (Umum/Display) BW Rp. 77.500/mmk FC Rp. 177.500/mmk, Klasika Batavia: 1 kolom Rp. 45.000/mmk; mini (min.3 baris, maks. 12 baris) Rp. 44.000/baris; Duka Cita s/d 300 mmk Rp. 38.000/mmk. Nusantara: 1 kolom Rp. 52.000/mmk, mini (min. 3 baris, maks. 12 baris) Rp. 50.000/baris, duka cita s/d 300/mmk Rp. 45.000/mmk; belum termasuk PPN 10%, pembayaram di muka. Iklan duka cita untuk dimuat besok dapat diterima sampai pukul 16.00WIB. **Bagian Iklan:** Jl. Palmerah Selatan 15, Jakarta 10270. **Telepon:** 5367 9909, 5367 9599. **Fax:** 53699080. **Senin s/d Jumat 08.30-16.00, Sabtu 08.30-12.00, Minggu 13.00-16.00; JL. GAJAH MADA 109-110A, JAKARTA 11140. TELEPON:** 260 1234, 260 1555. **FAX:** 260 1611 **SENIN S/D JUMAT 08.30-16.00, SABTU 08.30-12.00, MINGGU TUTUP. BAGIAN SIRKULASI (LANGGANAN):** Jl. GAJAH MADA 104, JAKARTA 11140. **TELEPON (LANGSUNG):** 260 1617-18. **PABX:** 260 1234 DAN 260 1555 **PESAWAT 1230 S/D 1239 FAX:** 260 1622/**HARGA LANGGANAN:** RP. 78.000/BULAN. **REKENING :** BNI 1946 Jakarta Kota No. 14132806. BRI Jakarta Kota No. 0019.01000168308. Giro Pos: A 13.444.BCA Jalan Gajah Mada No. 122 B-C-D Jakarta No. 021-393521-4. **KHUSUS BAGIAN IKLAN No.**

peristiwa ini Megawati tercatat sebagai Ketua Umum [Partai Demokrasi Indonesia](#) dan anggota Komisi I [DPR](#), namun setelah peristiwa inilah, namanya dikenal di seluruh Indonesia.

1. Sejarah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)

Setelah dibukanya keran demokrasi pada masa pemerintahan Presiden [Habibie](#), untuk menyongsong [Pemilu 1999](#), PDI-P didirikan. Dalam Pemilu ini, PDI-P menduduki peringkat pertama untuk suara [DPR](#) dengan memperoleh 151 kursi. Walaupun demikian, PDI-P gagal mengusung Megawati ke kursi kepresidenan, karena kalah voting dalam Sidang Umum [MPR1999](#) dari [Abdurrahman Wahid](#), dan oleh karenanya Megawati menduduki kursi wakil presiden. Setelah Abdurrahman Wahid turun dari jabatan presiden pada tahun [2001](#), PDI-P berhasil menempatkan Megawati ke kursi presiden.

Dalam [Pemilu Legislatif 2004](#), perolehan suara PDI-P turun ke peringkat kedua, dengan 109 kursi. Untuk [Pemilu Presiden 2004](#), PDI-P kembali mencalonkan Megawati sebagai calon presiden, berpasangan dengan [KH Hasyim Muzadi](#) sebagai calon wakil presiden. Pada [Pemilu Legislatif 2009](#), perolehan suara PDI-P kembali turun ke peringkat ke-tiga dengan jumlah kursi sebanyak 94 kursi. PDI-P kemudian bersama dengan [Partai Gerindra](#) mengusung pasangan Megawati Soekarnoputri dan [Prabowo Subianto](#) sebagai pasangan calon presiden dan calon wakil presiden pada [Pemilu Presiden 2009](#).

Pada [Pemilihan Umum Legislatif 2014](#) kali ini, PDI-P berhasil meraih peringkat pertama dan mendapatkan perolehan suara sebanyak 18.95% dan perolehan kursi DPR sebanyak 109 kursi. PDI-P bersama dengan [Partai NasDem](#), [Partai Kebangkitan Bangsa](#), [Partai Hanura](#), dan [Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia](#) dalam [Pemilihan Presiden 2014](#) kali ini mengusung

4. Pencapaian pada Pemilu Anggota DPR 2009

PDI-P mendapat 95 kursi (16,96%) di DPR hasil [Pemilihan Umum Anggota DPR 2009](#), setelah mendapat 14.600.091 suara (14,0%). Dengan hasil ini, PDI-P menempati posisi ketiga dalam perolehan suara serta kursi di DPR.

5. Pencapaian pada Pemilu Anggota DPR 2014

PDI-P mendapat 109 kursi (19,46%) di DPR hasil [Pemilihan Umum Anggota DPR 2014](#), setelah mendapat 23.681.471 suara (18,95%). Dengan hasil ini, PDI-P menempati posisi pertama dalam perolehan suara serta kursi di DPR.

6. Susunan pengurus

Berikut merupakan susunan pengurus PDI Perjuangan untuk masa kerja [2015—2020](#) hasil Kongres IV di Hotel Inna Grand Bali Beach, [Bali, April 2015](#).

- Ketua Umum: [Megawati Soekarnoputri](#)
- Ketua Dewan Pimpinan Pusat:
 - Bidang Kehormatan Partai: [Komaruddin Watubun](#)
 - Bidang Politik dan Keamanan: [Puan Maharani](#)
 - Bidang Pemenangan Pemilu: [Bambang Dwi Hartono](#)
 - Bidang Ideologi dan Kaderisasi: [Idham Samawi](#)
 - Bidang Keanggotaan dan Organisasi: [Djarot Saiful Hidayat](#)
 - Bidang Hukum HAM dan Perundang-undangan: [Trimedya Panjaitan](#)
 - Bidang Perekonomian: [Hendrawan Supratikno](#)

